

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki keberpihakan kepada rakyat dan memang ditujukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan

tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Kebijakan publik sebagai proses yang krusial seringkali dicampuri oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu. Sehingga baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, dapat melenceng dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu banyak masalah yang timbul dalam masyarakat setiap harinya, Hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui suatu kebijakan publik.

Dalam hal ini, fenomena kemiskinan dan merebaknya pandemi Covid-19 telah menjadi sebuah hal yang melekat dalam sendi kehidupan negara-negara di Dunia. Di Indonesia, hingga kini masyarakat miskin semakin mengalami kesulitan dengan adanya pandemic Covid-19. Kebijakan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengurangi berbagai kegiatan masyarakat di luar rumah, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini pasti banyak warga yang berharap bantuan sosial dari pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satu dari sekian banyak program tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai merupakan program yang di keluarkan oleh pemerintah sebagai reaksi atas merebaknya pandemic virus Covid-19 di dunia dan khususnya Indonesia, agar mampu membantu kalangan masyarakat miskin yang mengalami dampak dari virus ini. Presiden Jokowi telah

mengeluarkan Perppu No.1 tahun 2020 sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah untuk menangani dampak social-ekonomi wabah Covid-19. Untuk menangani dampak social-ekonomi pada masyarakat miskin dan rentan miskin, Perppu mengalokasikan anggaran khusus dalam berbagai bentuk kegiatan. Antara lain Kartu Prakerja, Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Subsidi Biaya Listrik dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria.

Dengan adanya program ini di Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Terdapat 185 Kepala Keluarga (KK) yang berkesempatan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan total rincian dana Desa sebesar Rp333.000.000, sedangkan yang terdaftar untuk menerima bantuan ini tercatat 177 Kepala Keluarga (KK) dengan pengeluaran dana Desa sebesar Rp318.600.000. Itu berarti masih ada 8 Kepala Keluarga (KK) dengan sisa dana Rp14.400.000 yang belum terdaftar dalam program tersebut. Padahal total dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperuntukkan bagi besarnya jumlah Kepala Keluarga (KK) terdampak Covid-19 tersebut.

Terkhususnya di Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dimana terdapat 467 Kepala Keluarga (KK) atau masyarakat miskin yang hidupnya semakin sulit di tengah pandemi Covid-19. Adanya Protokol Kesehatan membuat mereka sulit menjalankan aktivitas bekerja sebagai petani, wirausaha, ojek, sopir, relawan pendidikan, tenaga honorer, tukang batu, dan lain-lain. Bahkan terdapat masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup mereka. Namun masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Disinilah peran pemerintah untuk bekerja sama yang baik dengan masyarakat miskin agar program ini dapat terlaksana dengan lancar dan tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa diharapkan mampu menanggulangi dan memiliki manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Masyarakat Miskin terdampak Covid-19 Di Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Apa saja faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.